

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan otonomi daerah dan pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya.

pembangunan infrastruktur di desa menjadi aspek yang penting untuk menjawab permasalahan pembangunan desa. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu penggerak roda perekonomian untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur dalam pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Akan tetapi kesenjangan pembangunan infrastruktur dan masih banyaknya masyarakat miskin menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.1 Data per Tahun Masyarakat Miskin Kabupaten Pelalawan

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pelalawan (Persen)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pelalawan	18.63	16.71	14.51	11.93	11.11	12	11.15	12.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

Di kabupaten Pelalawan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kelurahan salah satunya dilakukan melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan (PPIDK) Mandiri Kebijakan ini menitik beratkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan untuk Desa Terbangiang. Dalam pelaksanaan program PPIDK Desa Terbangiang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur aliran listrik. Program ini dikerjakan dengan melibatkan peran pemerintahan desa serta ke-aktif masyarakat setempat.

Hal ini juga dapat menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan, berfungsi mengatasi pengangguran dan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Alasan lain program PPIDK Mandiri ini adalah bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor dari luar Desa/Kelurahan kurang memberikan dampak yang signifikan dalam membangkitkan dan menggerakkan perekonomian Desa/Kelurahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar uang pembangunan infrastruktur tersebut akan dibawa dan digunakan di luar Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah pekerjaan itu selesai.

Oleh karena itu Pemerintah kabupaten Pelalawan menggulirkan Program PPIDK Mandiri ini untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat desa/kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur yang bersifat sederhana dan dapat dikerjakan dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana serta sesuai kebutuhan yang paling mendesak di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Dalam aplikasi di lapangan, berbasis pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa/kelurahannya. Dengan pola ini, masyarakat sudah dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan. Sehingga masyarakat tempatan benar-benar dilibatkan secara utuh. program PPIDK ini mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur desa/kelurahan serta menimbulkan kesadaran memelihara infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan melalui media massa (News.okezone.com). Bahwa baru lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang telah mendapatkan penerangan listrik. Masih ada beberapa desa lainnya yang belum menikmati aliran listrik seperti yang diungkapkan Camat Bandar Petalangan, Amri Juharza, dikutip dari riaumandiri, di Kecamatan Bandar Petalangan terdapat 10 desa dan satu kelurahan. "Lima desa dan satu kelurahan telah mendapatkan penerangan listrik. Masih ada beberapa

desa lagi yang belum, akhir tahun ini seluruhnya sudah teraliri listrik. Yaitu, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Terbangiang dan Desa tambun. Jaringan listrik untuk beberapa desa tersebut dibangun dengan dana APBD Pelalawan melalui program PPIDK. Sebelum dibangun jaringan listrik, masyarakat di Bandar Petalangan masih menggunakan genset desa (PLTD), dengan penerangan waktu terbatas. Dari ke lima desa tersebut peneliti memfokuskan Desa Terbangiang sebagai objek penelitian.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Konsumen PLN Desa Terbangiang 2015

NO	NAMA	RT	KWH	KETERANGAN
1	SYAMSUAR.J	1	1300	
2	MUHAMMAD BAKAR	1	1300	
3	ADI WIDODO	1	1300	
4	VERO ANRIANTO	1	1300	
5	PANUT	1	1300	
6	MAWARDI ZAS	1	1300	
7	JAYO	1	900	
8	JANTAN KETK	1	1300	
9	AMBRAN	1	1300	
10	ZULHAM	1	1300	
11	RUSLAN	1	1300	
12	JISAD	1	1300	
13	SUMIATI	1	1300	
14	KAMARZAH	1	1300	
15	AMIR	1	1300	
16	MUKHTAR	2	1300	
17	HAMDAN	2	1300	
18	SYAMRIN	2	900	
19	MARDIOL	2	1300	
20	RUSLI	2	1300	
21	JAMAL	2	1300	
22	SYAFRIN	2	1300	

23	KASMIRAN	2	1300	
24	ILAN	2	1300	
25	ADRIANUS	2	1300	
26	EPIN	2	2200	
27	MURIS	2	1300	
28	ROBA'A	2	1300	
29	JEJE	2	1300	
30	SAHER	2	1300	
31	ESA	3	1300	
32	KOMAR	3	1300	
33	CUPAU	3	1300	
34	BANDUAMIN	3	1300	
35	ERI	3	1300	
36	GONDAI	3	1300	
37	ABU NAWAS	3	1300	
38	TER ASIZ	3	1300	
39	BASRAH	3	1300	
40	PANI	3	1300	
41	SAMSUDIN	4	1300	
42	SULHAIMI	4	1300	
43	RUSLI	4	1300	
44	ALI	4	1300	
45	RUDI	4	1300	
46	UWAR.M	4	1300	
47	SARIDIN	4	1300	
48	GIDIT	4	900	
49	UCOK NIUS	4	1300	
50	BASRUN	4	1300	
51	BONI	4	1300	
52	NOMBUN	4	1300	
53	ANTO.T	4	1300	
54	CANTIK	4	1300	
55	MUKTAR SANTI	4	1300	
56	BUJANG PUTIH	5	1300	
57	ANTONI VIRGO	5	1300	
58	MUSLIM	5	1300	
59	JUSMAN	5	1300	
60	ASMA	5	1300	
61	MUNIR	5	1300	
62	MINA	5	2200	
63	BUYUNG	5	1300	
64	HERIANTO	5	1300	
65	KASIR	5	1300	

66	HAIRAT	5	1300	
67	MINTARO	5	1300	
68	SABAR	5	1300	
69	RINTAN	5	900	
70	BILOS	5	1300	
71	ZAINAP	5	1300	
72	PIKA	5	1300	
73	JOMA	5	1300	
74	USIN	5	1300	
75	WAHAB	5	1300	
76	MUSLIADI	5	1300	
77	RUSLAN	5	900	
78	EPI.L	5	1300	
79	SARMIN	5	1300	
80	SAPARUDIN	5	1300	
81	SUKARDI	6	1300	
82	JAMRIS	6	1300	
83	AMRI	6	1300	
84	SIUNG	6	1300	
85	ERMAN	6	1300	
86	JAILANI	6	1300	
87	DAUD	6	1300	
88	LEMAN	6	1300	
89	IYAY	6	1300	
90	MULIN	6	1300	
91	SARIAT	6	1300	
92	BAMBANG	7	1300	
93	LIUS	7	1300	
94	WAGIMAN	7	1300	
95	IJAN	7	1300	
96	SAMSIR	7	1300	
97	ANTON	7	1300	
98	ISAM NUR	7	1300	
99	APRIZON	7	1300	
100	ABU NAWAS ORO	7	1300	
101	HERI PALEMBANG	7	1300	
102	NASIR	7	1300	
103	DASMAN	7	1300	
104	DARMAN	7	1300	
105	KHAIRAT KUTAK	7	1300	
106	WIDODO	7	1300	
107	NELA	7	1300	
108	KEPIT	7	1300	

109	HERI HARTONO	7	1300	
110	RUDI HARTONO	7	1300	
111	OSIM	7	1300	
112	SUHADI	7	1300	
113	OCU SIDIK	7	1300	
114	SAPARUDIN OCOK	7	1300	
115	TALIB	7	1300	
116	MANSUR	7	1300	
117	YOSEP	7	1300	

Sumber : Dokumentasi Desa Terbangiang dalam PPIDK 2015

Sejauh ini proses pemasangan aliran listrik di Desa Terbangiang masih belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Terbangiang, hal ini disebabkan oleh keterlambatan masuknya aliran listrik dibanding desa-desa lain yang pembangunannya secara serentak sudah lebih dulu menikmati aliran listrik PLN. Dengan terlambatnya pembangunan jaringan listrik ini tentu akan menghambat usaha dan kegiatan masyarakat setempat. Dari apa yang telah dijabarkan di atas terkait program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) serta permasalahan yang ada maka penulis disini menyuguhkan judul skripsi *“Implementasi Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Listrik Desa Terbangiang Tahun 20”*

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Terhadap Pembangunan Listrik Desa Terbangiang Tahun 2015?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) terhadap pembangunan listrik Desa Terbangiang Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) dalam pembangunan listrik PLN Desa Terbangiang Tahun 2015
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) dalam pembangunan listrik PLN Desa Terbangiang Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat baik dari segi teori maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberi kontribusi pada pengembangan ilmu khususnya bidang yang berhubungan dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan kebijakan dan bahan pembelajaran bagi pengambil kebijakan.

2. Secara Empiris

Sebagai masukan untuk pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan dan pemerintahan Desa Terbangiang dalam pelaksanaan Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK).

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tersebut. Didalam bagian tertentu ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini teori merupakan suatu hak yang dilakukan untuk mendukung dan memecahkan masalah-masalah yang muncul. Sebelum peneliti mengemukakan teori-teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini ada baiknya penyusun mendefinisikan teori terlebih dahulu.

Menurut Snelbeck, teori adalah perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaktis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. (Lexy J. Moloeng. Hal 34).

Dari pendapat Snelbeck, teori merupakan perangkat untuk membantu menjelaskan secara teratur tentang gejala-gejala sosial yang menjadi fenomena baru. Dalam hal itu, penulis akan memaparkan teori-teori yang membantu dalam penelitian ini.

1. Konsep Implementasi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu

- a. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996:232) bahwa “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” atau suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang

berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

2. Kebijakan Publik

Robert Eyestone mengatakan kebijakan publik secara luas dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. (Robert Eyestone. Hal 18). Konsep yang ditawarkan eyestone ini mengandung arti yang sangat luas, karena yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa meyangkut banyak hal. Batatasan lain kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.(Thomas R. Dye.Hal 1).

Menurut pakar ilmu politik lain. RicharhRose menyarankan bahwa “kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”.(Richarch Rose. Hal 79).

Sedangkan Carl Fried-rich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi alam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Defenisi yang

diberikan oleh Fried-rich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga kelompok maupun individu. Namun satu hal yang perlu di ingat dalam mendefenisikan kebijakan adalah bahwa pendefenisian kebijakan harus mempunyai pengertian apa yang sebenarnya dilakukan ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi sehingga defenisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang di usulkan menjadi kurang memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka defenisi kebijakan publik yang ditawarkan James Anderson dalam hemat penulis lebih tepat. Menurut Anderson kebijakan merupakan arahan tindakan yang mempunyai maksud yangtelah ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. (Anderson. Hal 4).

3. Pengertian Implementasi

Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi dan prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program”.(Lester & Srewart. Hal 104). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin

dapat dipahami sebagai ssuatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implemetasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan berbagai aktor, khususnya birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.(Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin. Hal 4).

Sedangkan Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.(MerileeS.Grindle. Hal 6).

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan publik yakni : pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila

perubahan marginal diperlukan akan konsensus tujuan adalah tinggi. Sebaliknya bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Disamping itu kebijakan-kebijakan perubahan besar atau konsensus tinggi diharapkan diimplementasikan lebih efektif daripada kebijakan-kebijakan yang mempunyai perubahan kecil dan konsensus rendah. Dengan demikian konsensus tujuan akan diharapkan pula mempunyai dampak yang besar pada proses implementasi kebijakan daripada unsur perubahan. Dengan saran-saran atau hipotesis-hipotesis seperti ini akan mengalihkan perhatian kepada penyelidikan terhadap faktor-faktor atau variabel-variabel yang tercakup dalam proses implementasi menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji.

Ada 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan prpses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka akan sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia , sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu, karena mau tiak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang tgerjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik tersebut, demikian halnya dengan sumberdaya waktu saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran ana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal mini pun dapat menjadi spentebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karateristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi nonformal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku dan tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat kepada aturan serta perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksanaan diturunkan sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu cakupan atau luasan wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Van Meter dan Van Horn menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompensasi dan ukuran suatu badan.
- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit pelaksana dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.

- 3) Sumber-sumber politik atau organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)
 - 4) Vitalitas suatu organisasi.
 - 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
4. Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana
- Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang merasakannya. Tetapi kebijakan implementor yang akan dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosiasal dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi, dan politik yang tidak kondusif menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomisosial dan politik dari yuridiski atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecendrungan-kecendrungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri kondisi- kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiski atau organisai dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan-badan administrasi maupun tingkat dukungan politik

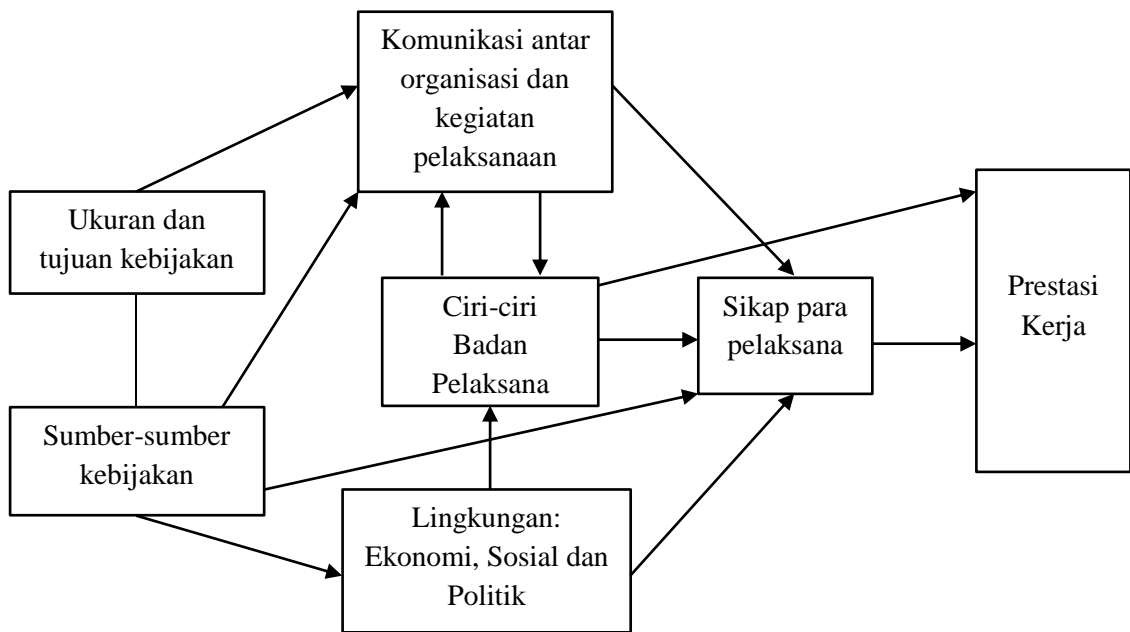
yang dimiliki. Kondisi lingkungan juga akan berpengaruh pada kecendrungan-kecendrungan para pelaksana. Jika masalah-masalah dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warga negara swasta serta kelompok-kelompok kepentingan dimobilisir untuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan para pelaksana menolak program tersebut. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kondisi-kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan mereka terhadap kebijakan itu. Akhirnya, variabel-variabel lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian-pemberian pelayanan publik. Kondisi-kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau membatasi pencapaian, sekalipun kecendrungan-kecendrungan para pelaksana dan kekuatan-kekuatan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program.

Bila variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi implementasi kebijakan maka hal ini juga berlaku untuk variabel-variabel lainnya.

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah.

Proses implementasi dalam kenyataannya dapat berhasil, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai (outcome). Karena dalam proses tersebut terlibat berbagai unsur yang dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program adalah dengan membandingkan antara hasil dengan pencapaian target program tersebut.

Gambar 1.1 Model Proses Implementasi Kebijakan



Selain itu, menurut Van Meter dan Van Horn, ada lima variabel yang dapat menjadi proses serta mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standard dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

F. Defenisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang nantinya akan menentukan variabel-variabel yang saling berhubungan yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual ini sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan dan sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghindari pengkaburan tema dari penelitian, maka perlu diperjelas bahwa yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
2. Implementasi Kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.
3. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) adalah sarana bagi setiap desa dan kelurahan dalam

membangun serta menentukan secara mandiri dan musyawarah masyarakat dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang mereka perlukan.

G. Defenisi Oprasional

Definisi operasional adalah petunjuk atau cara kerja untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional yang digunakan Peneliti akan membantu Peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan pada teori tentang Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, implementasi dipengaruhi dan dapat diproses oleh lima indikator, yaitu:

A. Implementasi Program Percepatan pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) dalam pembangunan listrik Desa Terbangiang Tahun 2015

1. Standar sasaran

- a. Kejelasan terkait standar tujuan dan sasaran program PPIDK ;

2. Sumberdaya

- a. Kejelasan tugas yang dimiliki implementator terkait Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK);
- b. Kejelasan terkait dengan sumberdaya financial atau anggaran;

- c. Kejelasan terkait kualitas, kuantitas dan profesionalitas aparat pelaksana;
 - 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas
 - a. Kejelasan terkait dengan kewenangan dalam mengurus kebijakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan kelurahan;
 - b. Kejelasan terkait dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan;
 - 4. Karakteristik agen pelaksana
 - a. Kejelasan terkait karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur desa dan Kelurahan (PPIDK);
 - b. Kejelasan terkait relasi dan koordinasi antar implementator;
 - 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
 - a. Kejelasan terkait dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik lingkungan;
 - b. Kejelasan terkait dengan keadaan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) dalam pembangunan listrik Desa Terbangiang Tahun 2015

1. Kejelasan terkait faktor internal implementasi program PPIDK Desa Terbangiang Tahun 2015;
2. Kejelasan terkait faktor eksternal implementasi program PPIDK Desa Terbangiang Tahun 2015;

H. Metode penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2002, h.27) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dengan didasarkan atas keinginan mengetahui secara jelas bagaimana Peran Pemerintahan Desa Terbangiang dalam Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Tahun 2015.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data pada subyek informasi yang dicari. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait tujuan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data skunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data skunder dari penelitian ini diambil oleh penulis dari berbagai media cetak maupun elektronik dan berbagai laporan-laporan dari pihak terkait. Data ini diperoleh dari

dokumentasi dan laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dilakukan berulang pada informan yang sama yaitu aparat pelaksana dan masyarakat penerima pelayanan. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan rinci dan mendalam.

2) Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di lokasi penelitian yakni di Desa Terbangiang.

5. Unit Analisis

Unit analisis berisi tentang penegasan unit atau kesatuan yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan penyusunan yang akan menjadi unit-unit yang dianalisis, yaitu pihak-pihak yang

terkait. Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah orang di pemerintahan Desa Terbangiang, Masyarakat Desa Terbangiang dan organisasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta pihak-pihak yang terlibat dalam Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Tahun 2015.

6. Teknik analisis data

A. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif yang mana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian

diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan data yang terkumpul lainnya.